

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan kumpulan dari segala aktivitas perusahaan secara jelas dan terperinci. Informasi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang perlu membuat keputusan mengenai entitas bisnis yang dilaporkan (Guskhairani & Zulvia, 2024). Laporan keuangan yang baik dan berkualitas sangat bergantung pada proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan proses pengiktisaran transaksi serta kejadian keuangan, termasuk dengan interpretasi ataupun hasil yang diperoleh. Menurut Arvidsson & Dumay, (2022) *International Integrated Reporting Council (IIRC)*, *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, dan *Global Reporting Initiative (GRI)* menganjurkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaporan dengan menggunakan kerangka kerja pelaporan mereka. Selain itu, hal ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai kualitas pelaporan yang baik sehingga para penyusun laporan dapat memenuhi harapan pengguna.

Dalam konteks ini, organisasi sektor publik yang seringkali dihubungkan dengan pemerintah, sebagai pemilik tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Sebagai entitas publik, pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk mengelola keuangan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dengan cara yang efisien, ekonomis, efektif, dan transparan (Ferlia *et al.*, 2023). Laporan keuangan pemerintah daerah, yang

merupakan gabungan dari laporan keuangan berbagai organisasi di dalamnya, disusun berdasarkan Kerangka Konseptual PP No. 71 tahun 2010 paragraf 24. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan informasi yang penting mengenai posisi keuangan dan transaksi yang terjadi selama satu periode pelaporan. Informasi tersebut digunakan untuk menilai penggunaan sumber daya ekonomi dalam operasional pemerintahan, kondisi keuangan, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Yulianda *et al.*, 2022).

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, strategi yang efektif diperlukan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk memastikan pencatatan dokumen, perencanaan, dan anggaran di tingkat SKPD lebih teratur (Meynaldi & Rosalina, 2023). Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 maka Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan data mengenai pemerintahan daerah, yang mencakup informasi terkait pembangunan serta informasi keuangan lainnya. Semua data tersebut dikelola dalam sistem informasi pemerintah daerah (Lumbantobing *et al.*, 2022).

Sistem informasi pemerintah daerah atau biasa disebut dengan SIPD merupakan sistem informasi pada pemerintah Indonesia yang menjadi pusat otonomi dan telah memberikan dampak besar kepada ruang lingkup kerja dan penyelenggaraan pemerintah pada umumnya, sehingga memberikan dampak kepada perubahan pengaturan sistem pemerintah daerah (Vitriana *et al.*, 2022). Jika SIPD diimplementasikan secara baik, hal ini akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari ketersediaan data yang lengkap, seperti peningkatan kualitas dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Proses

pengambilan data juga menjadi lebih efisien tanpa melalui tahapan yang rumit. Selain itu, dengan tersedianya data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, perencanaan pembangunan daerah akan menjadi lebih efektif. SIPD juga akan membentuk pusat data yang mencakup seluruh daerah, yang nantinya menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah (Zakaria *et al.*, 2023).

SIPD bukanlah sistem pertama yang ada, sebelumnya sudah ada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Peralihan dari SIMDA ke SIPD tentu membutuhkan waktu transisi. Setiap Pemerintah Daerah memiliki tingkat kesiapan yang beragam, sehingga penerapan SIPD tidak dilakukan secara serentak (Pramana *et al.*, 2023). Rosyidah *et al.*, (2024) menyatakan BPKAD Bojonegoro telah menggunakan aplikasi SIPD berbasis web dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat membantu BPKAD dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi yang ada di bawah pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro. Karena sistem informasi pemerintah daerah ini baru diterapkan mulai tahun 2021 oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro, maka masih terdapat masalah dan kendala yang dialami oleh BPKAD Kabupaten Bojonegoro dalam penggunaannya.

Perubahan mendasar pada aplikasi yang kurang memadai dapat berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ardianto & Eforia, (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi yang tepat berhubungan erat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut hasil pemeriksaan dari web badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia BPK RI (BPK Jawa Timur, n.d.).

kabupaten Bojonegoro telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 kali berturut – turut atau dalam waktu 10 tahun terakhir mendapatkan hasil pemeriksaan WTP yang berarti mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Opini BPK tersebut mencerminkan akuntabilitas, transparansi, serta tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yang dilaporkan dalam LKPD. LKPD sendiri merupakan hasil dari sistem informasi akuntansi daerah.

Perlu dicatat bahwa meskipun Kabupaten Bojonegoro telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut, tidak membuat pemerintah kabupaten Bojonegoro optimal dalam pengelolaan laporan keuangan tersebut. Terdapat surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : 100/S-HP/XVIII.SBY/05/2024 tahun 2024 dalam LKPD tahun 2023 yang menyatakan bahwa BPK menemukan kelemahan dalam hal pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satunya aplikasi SIPD yang belum sepenuhnya mendukung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten Bojonegoro tahun 2023. Dalam surat tersebut, BPK menyoroti adanya kendala teknis dan keterbatasan sistem karena sistem belum terintegrasi secara menyeluruh. Adanya surat tersebut menjadi salah satu alasan penting dilakukannya penelitian ini, yang difokuskan pada modul akuntansi dan pelaporan keuangan. Modul ini dipilih karena merupakan bagian inti dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, yang berkaitan erat dengan ketepatan waktu, keandalan, dan kesesuaian pelaporan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem ini sebenarnya diterapkan di tingkat daerah, serta sejauh mana dukungan teknis dan sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung proses pelaporan keuangan. Selain itu,

pelaporan keuangan juga dipengaruhi oleh keberadaan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal seharusnya memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai prosedur, terdokumentasi dengan baik, dan mampu menjamin akuntabilitas. Sejauh mana pengendalian internal telah dijalankan secara efektif dalam mendukung proses pelaporan keuangan pemerintah daerah masih menjadi pertanyaan yang perlu dikaji lebih dalam. Melalui penelitian ini, penulis ingin memahami bagaimana penerapan SIPD dan sistem pengendalian internal dijalankan dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah di Kabupaten Bojonegoro.

Pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal adalah metode untuk mengarahkan, mengevaluasi, dan mengukur sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, serta berperan krusial dalam pencegahan dan deteksi terhadap tindakan penyelewengan dan kecurangan (Lestari & Dewi, 2020). Dalam konteks laporan keuangan, pengendalian internal berperan penting dalam menjaga akurasi, kelengkapan, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan sehingga dapat menjaga kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal memiliki peran yang penting dalam kesuksesan setiap organisasi, termasuk pemerintah daerah, karena pengendalian internal yang efektif akan mendukung tercapainya kinerja organisasi yang optimal. Dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian internal yang kuat menjadi faktor kunci untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kualitas

laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal yang diterapkan (Hanifah & Kusumastuti, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) modul akuntansi dan pelaporan keuangan serta sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Bojonegoro. Topik analisis penerapan SIPD ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Si, (2021) dengan lokasi penelitian kota Medan dan Meynaldi & Rosalina, (2023) pada provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa penerapan SIPD sudah berjalan dengan cukup lancar. Namun penelitian yang dilakukan oleh Pramana *et al.*, (2023) pada Kabupaten Nganjuk dan penelitian Vitriana *et al.*, (2022) pada Pekanbaru mendapatkan hasil yang berbeda, bahwa penerapan SIPD belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat beberapa kendala. Dengan adanya inkonsistensi hasil penelitian terkait penerapan SIPD di berbagai daerah, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan lokasi yang berbeda, yaitu pada Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini, penambahan fokus terhadap pengendalian internal dilatar belakangi oleh adanya temuan BPK yang menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan di Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi kendala, terutama dari sisi sistem dan integrasi melalui aplikasi SIPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pengendalian internal dalam mendukung kualitas pelaporan keuangan masih perlu mendapat perhatian. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran kondisi objektif di Kabupaten Bojonegoro, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengoptimalkan

pemanfaatan SIPD serta penguatan sistem pengendalian internal, terutama dalam penyusunan laporan keuangan

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahanya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) modul akuntansi dan pelaporan dalam mendukung pelaporan keuangan daerah kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam mendukung pelaporan keuangan daerah kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) modul akuntansi dan pelaporan dalam mendukung pelaporan keuangan daerah kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian dalam mendukung pelaporan keuangan daerah kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Internal . Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat atau memberikan sudut pandang baru terhadap teori implementasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan SIPD dan sistem pengendalian internal yang telah berjalan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian lain yang ingin membahas topik serupa, baik dengan pendekatan yang berbeda maupun pada wilayah yang berbeda. Temuan dan kerangka analisis yang digunakan diharapkan dapat membantu peneliti berikutnya dalam menyusun studi lanjutan yang lebih mendalam.